

BAB IV

Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implikasi penerapan Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib terhadap penyalahgunaan kewenangan DPR RI, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 228 ayat (1) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2025 lahir sebagai upaya DPR untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap pejabat negara pasca uji kelayakan dan kepatutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjaga akuntabilitas dan integritas pejabat yang telah ditetapkan melalui rapat paripurna. Namun secara yuridis, pengaturan evaluasi berkala tersebut tidak memiliki dasar atribusi maupun delegasi yang jelas dari UUD 1945 maupun UU MD3. Tata tertib DPR sebagai peraturan internal tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga penambahan kewenangan evaluatif terhadap pejabat negara berpotensi melampaui kewenangan konstitusional DPR dan bertentangan dengan prinsip legalitas.
2. Penerapan Penerapan Pasal 228 ayat (1) berimplikasi pada terbukanya potensi penyalahgunaan kewenangan DPR RI serta terganggunya prinsip checks and balances, yaitu prinsip keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga

negara. Ketentuan evaluasi yang bersifat mengikat tanpa parameter dan mekanisme prosedural yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang intervensi politik DPR RI terhadap lembaga eksekutif, yudikatif, dan lembaga independen. Kondisi tersebut berpotensi melemahkan independensi pejabat negara dan mendorong dominasi fungsi legislatif yang melampaui batas pengawasan konstitusionalnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pengaturan evaluasi pejabat negara oleh DPR RI yang saat ini dilaksanakan berdasarkan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, perlu diperjelas melalui peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi daripada Peraturan DPR RI. Pengaturan tersebut harus memuat batasan kewenangan, standar evaluasi yang objektif, serta jaminan perlindungan terhadap independensi lembaga negara.
2. DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu menerapkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas. Evaluasi pejabat negara sebaiknya dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bersifat rekomendatif, serta disertai mekanisme pengawasan publik guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan menjaga keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Daftar Pustaka

A. Buku

DR. DRS. H. HARPANI MATNUH, M.H. *CONSTITUTIONAL LAW*. Banjarmasin, 2021. https://ppkn.fkip.ulm.ac.id/wpcontent/uploads/2025/07/BUKU-AJAR-HUKUM-TATA-NEGARA_compressed.pdf.

Jimly Asshidiqie. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara," 2013, 121. www.mahkamahkonstitusi.go.id.

B. Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib.

C. Jurnal-Jurnal

Amiruddin, Denie. "Konstitusionalitas Tata Tertib DPR : Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara ? Constitutionality of the DPR ' s Rules of Procedure : Does the DPR Have the Authority to Evaluate the Performance of State Institutions ?" 1, no. 2 (2025).

Ansari, Tunggal, and Setia Negara. "Tunggal Ansari Setia Negara Pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1 (18)." *Aclj* 4, no. 1 (2023): 2023.

Asmara, Galang. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amendemen UUD NRI Tahun 1945 The Concept Of

Strengthening The Legislative Function Of House Of Representatives After The Amandment Of The Constitution Of The Republic Of” 4, no. 2 (2019).

Firdausy, Adriana G. “Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And BALANCES” 2, no. 2 (n.d.): 133–59.

Eva, Putu, and Ditayani Antari. “SISTEM PRESIDENSIAL DI INDONESIA” 4, no. April (2020).

Fudin, Hanif. “Negara : Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Checks and Balances Actualization of State Institutions : Between The People ’ s Consultative Assembly and The” 19 (2022).

Gaffar, Janedjri M. “Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu,” 2013.

Jalal, A. “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Studi Perilaku Anggota Dalam Melaksanakan Kekuasaan.” *Ilmu Dan Budaya* 41, no. 68 (2020): 7989–8006. http://journal.unas.ac.id/ilmu_budaya/article/view/875.

Kansil, Christine S T, Rama Adi, Saputra Sundaynatha, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. “Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah” 7, no. 1 (2023): 951–54.

Mannagalli, Ali, Radian Salman, Rosa Ristawati, Dri Utari, and Christina Rachmawati. “Judicial Independence Sebagai Syarat Good Governance Dalam Demokrasi Konstitusional” 6, no. 1 (2025): 354–66.

Moh Gandara Atribusi, Kewenangan, and Delegasi D A N Mandat. “Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat” 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.

Mohammad Zamroni. “KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Mohammad Zamroni Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia,.” 2024, 495–518.

Muhammad Haikal Rifurio “Pasal 228A Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2025 Tentang Tata Tertib: Problematika Kewenangan Evaluatif dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Muhammad, Universitas Tarumanagara 1128” 4, no. 1 (2025): 1128–41.

Nanda Herlinanur,Pangestoeti, Adrian, Rafidah, “Peran Amandemen UUD 1945 dalam Memperkuat Sistem Check and Balance, Multidisiplin, Jurnal Ilmiah. “Research Review” 3, no. 1 (2024).

Pambudi, Bima Rico, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita. “Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap

Independensi Peradilan.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 088–108.
<https://doi.org/10.31078/jk2215>.

Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. “Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) Dalam Perspektif Uu Nomor 31 Tahun 1999 Jo Uu NomoR” 4, No. 3 (2023): 663–71.

Siregar, Fritz Edward. “Between the People and the Populists : Safeguarding Judicial Independence in a Changing World” 10, no. 1 (2024).

Siregar, Sarah Nuraini. “Kajian Evaluatif Fungsi DPR Terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri,” 2011.

Soerjono, Soekanto, And Sri Mamudji. “Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat” 1, no. 1 (2014): 21–30.

Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. “Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman.” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2025): 1–8.

Wijoyo, Haryo, and Sunny Ummul Firdaus. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan” 6, no. 1 (2022): 57–79.

D. Website

Ama, Jefrianus Tamo. “FUNGSI PENGAWASAN KELEMBAGAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT.” *Universitas Widya Mataram*. univesitas widya mataram, n.d. <https://hukum.widyamatararam.ac.id/fungsi-pengawasan-kelembagaan-dewan-perwakilan-rakyat>.

Amiruddin, Denie. “Konstitusionalitas Tata Tertib DPR : Apakah DPR Berwenang Melakukan Evaluasi Terhadap Kinerja Lembaga Negara ? Constitutionality of the DPR ’ s Rules of Procedure : Does the DPR Have the Authority to Evaluate the Performance of State Institutions ?” 1, no. 2 (2025).

Andi Ahmas S, Baskara Isdiansyah. “Baleg DPR: Legislatif Tak Bisa Copot Pejabat, Cuma Evaluasi Dan Merekomendasikan.” *suara.com*, 2025. <https://www.suara.com/news/2025/02/06/173553/baleg-dpr-jelaskan-aturan-tatib-hanya-evaluasi-dan-rekomendasi-bukan-wewenang-pencopotan>.

Ansari, Tunggul, and Setia Negara. “Tunggul Ansari Setia Negara Pp. 1-9 Normative Legal Research in Indonesia: Its Origin and Approaches | 1 (18).” *Aclj* 4, no. 1 (2023): 2023.

Antara. “Wakil Ketua DPR: Revisi Peraturan DPR Akomodasi Evaluasi Pejabat Berkala.” Melalusa Susthira K, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/4625669/wakil-ketua-dpr-revisi-peraturan-dpr-akomodasi-evaluasi-pejabat-berkala>.

- Asmara, Galang. "Konsep Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Amandemen Uud Nri Tahun 1945 The Concept Of Strengthening The Legislative Function Of House Of Representatives After The Amandment Of The Constitution Of The Republic Of" 4, No. 2 (2019).
- Atribusi, Kewenangan, and Delegasi D A N Mandat. "Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat" 2, no. 3 (2020): 92–99. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i3>.
- BADAN LEGISLASI. "DPR Setujui Revisi Tatib, Legislatur: Buka Mekanisme Evaluasi Pejabat," 2025. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/53955/t/DPR%2BSetujui%2BRevisi%2BTatib%2C%2BLegislatur%3A%2BBuka%2BMekanisme%2BEvaluasi%2BPejabat>.
- berkas.dpr.go.id. "TATA TERTIB 2020," 2025. https://berkas.dpr.go.id/jdih/document/peraturan_dpr/2020absperdpr001.pdf.
- DR. DRS. H. HARPANI MATNUH, M.H. *CONSTITUTIONAL LAW*. Banjarmasin, 2021. https://ppkn.fkip.ulm.ac.id/wp-content/uploads/2025/07/BUKU-AJAR-HUKUM-TATA-NEGARA_compressed.pdf.
- Eva, Putu, and Ditayani Antari. "Sistem Presidensial Di Indonesia." *Ilmiah* 4, no. April (2020): 6–13.
- Fadel Prayoga, Deni Muliya. "Revisi Tatib, Ketua Baleg: DPR Berwenang Evaluasi Pejabat Negara." KOMPAS.TV, 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/571521/revisi-tatib-ketua-baleg-dpr-berwenang-evaluasi-pejabat-negara>.
- Setara Institute Sebut Revisi Tatib DPR Buka Ruang Transaksi Politik Untuk Jadi PejabatNo Title." KOMPAS.TV, 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/571778/setara-institute-sebut-revisi-tatib-dpr-buka-ruang-transaksi-politik-untuk-jadi-pejabat>.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan. "Revisi Tata Tertib DPR: Mengawasi Atau Menguasai." *kompas.id*, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/revisi-tata-tertib-dpr-mengawasi-atau-menguasai>.
- Firdausy, Adriana G. "Analisis Terhadap Pengawasan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Dpr Ri) Sebagai Perwujudan Prinsip Checks And Balances" 2, No. 2 (N.D.): 133–59.
- Fudin, Hanif. "Negara : Antara Majelis Permusyawaratan Rakyat Dan Mahkamah Konstitusi Checks and Balances Actualization of State Institutions : Between The People ' s Consultative Assembly and The" 19 (2022).
- Gaffar, Janedjri M. "Peran Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Terkait Penyelenggaraan Pemilu," 2013.

- humas. “Inilah Poin-Poin Penting UU No. 2/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17/2014 Tentang MD3.” sekretariat kabinet republik indonesia (setkab), 2018. <https://setkab.go.id/inilah-poin-poin-penting-uu-no-22018-tentang-perubahan-kedua-atas-uu-no-172014-tentang-md3>.
- Jalal, A. “Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia: Studi Perilaku Anggota Dalam Melaksanakan Kekuasaan.” *Ilmu Dan Budaya* 41, no. 68 (2020): 7989–8006. <http://journal.unas.ac.id/ilmu-budaya/article/view/875>.
- Jimly Asshidiqie. “Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,” 2013, 121. www.mahkamahkonstitusi.go.id.
- Kansil, Christine S T, Rama Adi, Saputra Sundaynatha, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, and Provinsi D K I Jakarta. “Efektivitas Komisi Pemberantasan Korupsi Sebelum Dan Sesudah Menjadi Lembaga Pemerintah” 7, no. 1 (2023): 951–54.
- kumparan.NEWS. “Menguak Isi Surat MK Ke DPR Sebelum Hakim Aswanto Tiba-Tiba Dicopot.” kumparan.NEWS, 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/menguak-isi-surat-mk-ke-dpr-sebelum-hakim-aswanto-tiba-tiba-dicopot-1yxXn75qZ0Y>.
- Kurniawan Eka Mulyana, Gading Persada. “Peneliti Berpendapat Kewenangan DPR Terlalu Besar Jika Mengevaluasi Pejabat Yang Mereka Pilih.” KOMPAS.TV, 2025. <https://www.kompas.tv/nasional/572039/peneliti-berpendapat-kewenangan-dpr-terlalu-besar-jika-mengevaluasi-pejabat-yang-mereka-pilih>.
- Mannagalli, Ali, Radian Salman, Rosa Ristawati, Dri Utari, and Christina Rachmawati. “Judicial Independence Sebagai Syarat Good Governance Dalam Demokrasi Konstitusional” 6, no. 1 (2025): 354–66.
- Mohammad Zamroni. “KONSEP KEWENANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Mohammad Zamroni Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah Surabaya, Surabaya, Indonesia,” 2024, 495–518.
- Multidisiplin, Jurnal Ilmiah. “Research Review” 3, no. 1 (2024).
- Negara, Hukum Tata, Sistem Presidensial, and Hierarki Norma. “Muhammad Haikal Rifurio – Universitas Tarumanagara 1128” 4, no. 1 (2025): 1128–41.
- Nicholas Martua Siagian. “Revisi Kilat Tatib DPR: Diversifikasi Kewenangan Hingga Distorsi Ketatanegaraan.” *hukum online*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/revisi-kilat-tatib-dpr--diversifikasi-kewenangan-hingga-distorsi-ketatanegaraan>.
- Pambudi, Bima Rico, Antikowati Antikowati, and Fenny Tria Yunita. “Penyalahgunaan Kewenangan DPR Dalam Penggantian Hakim Konstitusi: Ancaman Terhadap Independensi Peradilan.” *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 088–108. <https://doi.org/10.31078/jk2215>.

- pusat edukasi anti korupsi. "Beberapa Kasus Korupsi Di DPR Dan Dampaknya." pusat edukasi anti korupsi, 2023. <https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20231008-beberapa-kasus-korupsi-di-dpr-dan-dampaknya>.
- Putra, Zulfikar, Darmawan Wiridin, and Slamet Hariyadi. "Telaah Kritis Penyalahgunaan Wewenang Jabatan (Abuse Of Power) Dalam Perspektif UU Nomor 31 Tahun 1999" 4, no. 3 (2023): 663–71.
- Rahmawati, Dwi. "DPR Bisa Rekomendasikan Pemberhentian Pejabat Usai Tatib Baru Disahkan." detik.news, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-7762521/dpr-bisa-rekomendasikan-pemberhentian-pejabat-usai-tatib-baru-disahkan>.
- Rini Kustiasih. "Keputusan DPR Melanggar Tata Tertib, Tapi Tata Tertib Yang Diubah." kompas.id, 2021. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-ubah-tatib-untuk-sahkan-pansus-ikn>.
- Salam, Hidayat. "DPR Bisa Evaluasi Pejabat Negara, Independensi Lembaga Negara Kian Terancam." kompas.id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/dpr-bisa-evaluasi-pejabat-negara-independensi-lembaga-negara-kian-terancam>.
- Shela Octavia, Ardito Ramadhan. "Wewenang DPR Copot Pejabat Buka Celah Korupsi Demi Amankan Jabatan." KOMPAS.com, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/06/14511841/wewenang-dpr-copot-pejabat-buka-celah-korupsi-demi-amankan-jabatan>.
- Siregar, Fritz Edward. "Between the People and the Populists : Safeguarding Judicial Independence in a Changing World" 10, no. 1 (2024).
- Siregar, Sarah Nuraini. "Kajian Evaluatif Fungsi DPR Terhadap Pelaksanaan Reformasi Polri," 2011.
- Soerjono, Soekanto, And Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat." *Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2014): 21–30.
- Susana Rita Kumalasanti. "MA Diminta Batalkan Kewenangan DPR Mengevaluasi Pejabat Berpotensi Mengganggu Independensi Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung Diminta Membatalkan Revisi Tata Tertib DPR." kompas.id, 2025. <https://www.kompas.id/artikel/ma-diminta-batalkan-kewenangan-evaluasi-pejabat-oleh-dpr>.
- Swastika Pramesty Sawitri Arimby. "Kedudukan Peraturan DPR Tentang Tata Tertib Sebagai Peraturan Perundang-Undangan." Universitas Airlangga, 2024. <https://kumparan.com/swastika-pramesty/kedudukan-peraturan-dpr-tentang-tata-tertib-sebagai-peraturan-perundang-undangan-22BiYD0COz0>.
- Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman. "Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman." *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. April (2025): 1–8.

- Tim Hukumonline. “Tugas Dan Fungsi Legislasi, Anggaran, Dan Pengawasan DPR.” hukum online, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/tugas-dan-fungsi-legislasi--anggaran--dan-pengawasan-dpr-lt653b8c7e830d5>.
- Tri Jata Ayu Pramesti, S.H. “Hierarchy of Laws and Regulations in Indonesia.” hukum online, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hierarchy-of-laws-and-regulations-in-indonesia-lt63c7bc2fb5bcd>.
- Tria Sutrisna, Dani Prabowo. “Revisi Tatib Disetujui, DPR Kini Bisa Evaluasi Pejabat Yang Ditetapkan Dalam Paripurna.” KOMPAS.COM, 2025. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/12062361/revisi-tatib-disetujui-dpr-kini-bisa-evaluasi-pejabat-yang-ditetapkan-dalam>.
- Wijoyo, Haryo, and Sunny Ummul Firdaus. “Urgensi Pembatasan Masa Jabatan Anggota Legislatif Dalam Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan” 6, no. 1 (2022): 57–79.